



Pemerintah Kota Batu

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2018**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun sebagai rencana realisasi kerja dan anggaran yang telah sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun. Rencana Kerja ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019.

Diharapkan setiap pejabat pelaksana teknis kegiatan mempedomani rencana kerja ini sesuai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai capaian kinerjanya. Penyusunan dan usulan anggaran harus berpedoman dalam rangka capaian target kinerja pada rencana kerja ini.

Batu, 01 Nopember 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batu

Drs. MAULIDIONO, M.Pd.
NIP. 19600902 197907 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran PD, dalam bentuk kerangka kegiatan dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penyusunan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu membentuk tim penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan penyusunan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Renja tahun 2019 berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018-2022 dan mengacu pada rancangan awal RKPD. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

2. Substansi rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
3. Penyusunan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan target capaian capaian kinerja di bidang administrasi kependudukan.
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD.
5. Program/Kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota dirinci menurut sumber dana APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja PD mencakup:

1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan PD tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra PD dan RPJMD pada tahun bersangkutan.
2. Merumuskan program/ kegiatan wajib/ pilihan PD sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra PD maupun RPJMD.
3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/ kegiatan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakah program/ kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas PD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut.

4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas PD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan yang terkait dengan PD kedalam rancangan Renja PD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan Renja PD Propinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari PD Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota.
6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan PD yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan PD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
7. Menyiapkan forum PD atau Forum Gabungan PD untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap PD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala PD menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja PD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap PD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD.
8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan PD untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Renja PD, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan PD serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA-PD.
9. Rancangan Renja PD Provinsi memuat hasil identifikasi program dan kegiatan, dirinci menurut kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan serta perkiraan alokasi sumber pendanaan dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
10. Rancangan Renja PD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program dan kegiatan PD provinsi yang berasal dari RPJM provinsi dan/atau dari Renja PD provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD provinsi tahun sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 tentang Koordinasi Satu Desa/Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan

16. Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu;
18. Peraturan Walikota Batu Nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2019.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2019.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam dokumen Renja ini disajikan telaah dan analisis perencanaan hingga menghasilkan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2019. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan sistematika penulisan guna mendapatkan pembahasan yang runut dan tepat. Susunan garis besar isi dokumen ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Program dan Kegiatan

Bab 5 Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja PD pada tahun 2017 yang didasarkan atas Renstra 2013-2017 belum menyertakan indikator dan target secara jelas sehingga sulit dianalisis perkembangan capaian kinerjanya. Melalui penyesuaian indikator pengukuran kinerja SPM maka didapatkan hasil kinerja Renstra 2013-2017 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Perhitungan	Capaian tahun 2017	Capaian Hingga Triwulan III tahun 2018	Dasar
1.	Cakupan Kepemilikan KTP-el	(Jumlah kepemilikan KK : Jumlah KK) x 100%	100%	100%	Permendagri No 69 tahun 2012
2.	Cakupan Kepemilikan KTP-el	(Jumlah kepemilikan KTP-el : Jumlah wajib KTP-el) x 100%	85,6%	88,76%	Permendagri No 69 tahun 2012
3.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Anak usia 0-18 tahun)	(Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun : Jumlah anak usia 0-18 tahun) x 100%	86%	88%	Permendagri No 69 tahun 2012
4.	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	(Jumlah kepemilikan Akta Kematian : Jumlah Kematian) x 100%	41,3%	95%	Permendagri No 69 tahun 2012
5.	Nilai SKM	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017
6.	Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	(Jumlah jenis data kependudukan sesuai UU Nomor 24 tahun 2013 yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu dan lembaga lain terkait layanan publik yang menggunakan basis data kependudukan : jumlah jenis data kependudukan) x 100%	-	5%	Permendagri No 192 tahun 2013

Terlepas dari kendala-kendala dalam analisis capaian indikator kinerja, pada masa Renstra 2013-2017 sebagian besar telah mencapai target indikator yang telah direncanakan secara nasional. Pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya disajikan dalam Tabel T-C.29.

Tabel T-C. 29.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2018 s/d 2022 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d triwulan III	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD sd. Tahun berjalan (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/9
	Urusan : Wajib Non Pelayanan Dasar									
I	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el dan KK)	94%	100%	90%				100%	90%
1.	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	600 orang	265 orang	265 orang	265 orang	100%	265 orang	265 orang	100%
2.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	52.460 dokumen kependudukan	46.667 dokumen kependudukan	37.603 dokumen kependudukan	46.667 dokumen kependudukan	124%	37.603 dokumen kependudukan	46.667 dokumen kependudukan	124%
3.	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Ketersediaan blangko kependudukan, peralatan, dan perlengkapan	85.096 blangko	38.149 blangko,	38.149 blangko dan 2 jenis peralatan	38.149 blangko dan 2 jenis peralatan	100%	38.149 blangko, 2 peralatan	38.149 blangko, 2 peralatan	100%
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan	Jumlah tenaga register administrasi kependudukan		27 orang	27 orang	27 orang	100%	27 orang	27 orang	100%

5.	Pendataan Kependudukan di Kota Batu	Pendistribusian data Kependudukan dan Coklit			1207 RT	-	0%	1207 RT	-	0%
6.	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rapat Koordinasi Nasional dan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 kali	6 kali	5 kali	6 kali	120%	5 kali	6 kali	120%
7.	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Persentase penggunaan sistem penunjang SIAK yang berfungsi optimal			42%	75%	75%	42%	75%	75%
II.	Program Penataan Pencatatan Sipil	Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen akta pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	94%		90%				90%	
		Persentase ketepatan waktu pelayanan akta perkawinan, pengesahan anak dan perceraian	94%		90%				90%	
1.	Penyusunan Pemberkasan Elektronik Pencatatan Sipil	Jumlah arsip akta pencatatan sipil yang telah dialih media	377.000 berkas	19.000 berkas	19.000 berkas	19.000 berkas	100%	39.000 berkas	39.000 berkas	100%
2.	Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyimpanan Arsip Pencatatan Sipil	Jumlah rak arsip yang dikelola dan dirawat dengan baik			10 rak arsip	-	0%	10 rak arsip	-	0%
3.	Evaluasi dan Koordinasi Pencatatan Kematian dan Penerapan Buku Induk Kematian	Jumlah penerbitan akta kematian		1.207 akta	1.207 akta	1.126 akta	93%	1.207 akta	1.126 akta	93%
4.	Pembuatan Akte Kelahiran Secara Massal	Jumlah penerbitan akta kelahiran		5.000 akta	5.000 akta	8.722 akta	174%	5.000 akta	5.000 akta	100%

III.	Peningkatan Kualitas Database dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase data registrasi kependudukan yang valid	94%		90%			96%		
1.	Sinkronisasi, Konsolidasi, Dokumentasi dan pemutakhiran data kependudukan	Jumlah laporan kependudukan	56 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	7 laporan	100%
2.	Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi	Terpenuhi kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan		2 aplikasi	2 aplikasi	1 aplikasi	50%	2 aplikasi	1 aplikasi	50%
3.	Pemenuhan Sarana Jaringan, Perangkat Keras, Perangkat Lunak SIAK dan KTP-el	Jumlah sistem inovasi pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi		2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%

Batu, 01 Nopember 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batu

Drs. MAULIDIONO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600902 197907 1 002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan indikator utama dan hasil analisis terhadap kinerja pelaksanaan Renja tahun lalu dan tahun berjalan maka disusun indikator dan target pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2019 sebagaimana ditampilkan pada tabel T-C.30. Sedangkan dalam penghitungan kinerja, terutama untuk Eselon III masih dialami kendala karena belum dilakukan pengukuran mengenai kecepatan pelayanan. Hal ini sekaligus menjadi masukan untuk segera dilakukan pengukuran di triwulan IV ini.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi tahun ke -		Catatan Analisis
				(n-2) 2017	(n-1) 2018	(n) 2019	(n+1) 2020	(n-2) 2017	(n-1) Triwulan III 2018	(n) 2019	(n+1) 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ESELON II												
1.	Persentase Kepemilikan KTP-el	100%		-	91,7%	93,9%	95,7%	85,6%	88,76%			Kesenjangan capaian target kepemilikan KTP-el di tahun 2017 dikarenakan belum ditetapkannya target kinerja, peristiwa kependudukan yang bersifat dinamis, kebijakan kependudukan yang selalu berkembang, dan kendala teknis ketersediaan keping blangko yang dihadapi dalam pencetakan KTP-el di tahun-tahun sebelumnya.
2.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-18 tahun	90% (Tahun 2020)		-	90%	92%	94%	86%	88%			
3.	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	70% (Tahun 2020)		-	51%	61%	71%	41,3%	95%			
4.	Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan			-	5%	30%	50%	NA	3%			
ESELON III												
1.	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el dan KK)			-	90%	91%	92%	NA	NA			
2.	Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen akta kelahiran dan akta kematian			-	90%	91%	92%	NA	NA			
3.	Persentase ketepatan waktu pelayanan akta perkawinan, pengesahan anak dan perceraian			-	90%	91%	92%	NA	NA			
4.	Keamanan, Ketertiban dan Kemudahan Pelayanan Arsip Pencatatan Sipil			-	39%	51%	61%	NA	39%			
5.	Persentase data registrasi kependudukan yang valid			-	90%	91%	92%	NA	75%			
6.	Nilai IKM			-	81	82	83	NA	-			

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi tahun ke -		Catatan Analisis
				(n-2) 2017	(n-1) 2018	(n) 2019	(n+1) 2020	(n-2) 2017	(n-1) Triwulan III 2018	(n) 2019	(n+1) 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
ESELON IV												
1.	Jumlah peserta sosialisasi			238 orang	265 orang	600	-	238 orang	265			
2.	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan			-	37.603 dokumen	31.000 dokumen	32.464 dokumen	33.676 dokumen	165.474 dokumen			
3.	Ketersediaan blangko kependudukan, peralatan, dan perlengkapan			-	38149 Blangko	53.110 Blangko	63772 Blangko	-	38149 Blangko			
4.	Jumlah tenaga register administrasi kependudukan			-	27 orang	-	-	-	27 orang			
5.	Jumlah penerbitan akta kematian			-	1.828 akta	-	-	1.662 akta	916 akta			
6.	Jumlah penerbitan akta kelahiran			7.118	5.000 akta	-	-	5.456 akta	3.568 akta			
7.	Jumlah arsip akta pencatatan sipil yang telah dialih media			-	39.000 berkas	-	-	20.000 berkas	39.000 berkas			
8.	Jumlah laporan kependudukan			-	7 laporan	-	-	4 laporan	7 laporan			
9.	Jumlah sistem inovasi pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi			-	2 jenis	-	-	3 jenis	1 jenis			
11.	Persentase sistem penunjang SIAK yang dikelola dan berfungsi optimal			-	42%	-	-	-	70%			
12.	Jumlah Rakornas/ Bimtek/ koordinasi yang dilakukan			6 kali	5 kali	-	-	6 kali	6 kali			

Batu, 1 Nopember 2018

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batu**

Drs. MAULIDIONO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600902 197907 1 002

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD, selama ini masih dihadapi berbagai kendala terkait pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Masih tingginya jumlah Kartu Keluarga (KK) dengan data perseorangan kurang valid
2. Masih belum tercapainya target cakupan penerbitan KTP-el
3. Masih rendahnya jumlah cakupan penerbitan Akta Kelahiran
4. Masih rendahnya jumlah cakupan penerbitan Akta Kematian
5. Belum luasnya pemanfaatan data kependudukan
6. Pelayanan publik bidang administrasi kependudukan selalu menuntut inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan dan data

Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh:

1. Belum tuntasnya capaian perekaman KTP-el 100% yang juga disebabkan oleh adanya kendala wajib KTP-el tidak tinggal di tetap di Kota Batu, adanya juga data wajib KTP-el yang duplikat/ganda;
2. Kendala implementasi kebijakan, yakni masyarakat belum memahami kebijakan secara benar dan lengkap sebagaimana aturan yang berlaku;
3. Untuk mendapatkan data dengan akurasi yang baik maka diperlukan pengecekan lebih lanjut baik melalui SIAK maupun dalam kondisi riil
4. Belum tercatatnya peristiwa kelahiran dan kematian secara keseluruhan;
5. Rendahnya minat penduduk untuk mengurus Akte Kematian bagi anggota keluarganya yang telah meninggal;
6. Indikator kegiatan yang tidak terukur dalam penentuan keterkaitan capaiannya dengan kinerja;
7. Belum berjalannya kerjasama dengan institusi-institusi terkait dalam pemanfaatan data kependudukan;
8. Belum berjalannya koneksi data secara optimal antara Dispendukcapil dengan institusi terkait;
9. Belum dimilikinya basis data kependudukan yang cukup baik;
10. Masih kurang dikembangkannya sistem inovasi pelayanan kependudukan secara optimal.

Sedangkan dalam tataran secara nasional, kebijakan bidang administrasi kependudukan telah dikembangkan bukan hanya dalam hal pelayanan publik namun juga dalam hal pemanfaatan data kependudukan dan akurasi datanya.

Hal ini menjadi tantangan dan peluang tersendiri dalam pengembangan pelayanan dan pencapaian target standar pelayanan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada tabel 2.3 berikut. Kebutuhan dana indikatif disusun berdasarkan perkiraan kebutuhan awal.

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota Batu

Nama Perangkat Daerah (PD) : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Dispenduk capil	Persentase ketepatan waktu penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan selama 1 tahun	91%	2.904.095.141	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Dispenduk capil	Persentase ketepatan waktu penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan selama 1 tahun	91%	2.904.095.141	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi perkantoran	91%				Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi perkantoran	91%		
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	91%				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	91%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dispenduk capil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang tersedia	28 dokumen	43.850.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dispenduk capil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang tersedia	28 dokumen	43.850.000	
	Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Dispenduk capil	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	113 laporan	303.700.000	Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Dispenduk capil	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	113 laporan	303.700.000	
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Dispenduk capil	Jumlah barang dan jasa rutin perkantoran perangkat daerah yang disediakan	154 jenis	1.821.185.641	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Dispenduk capil	Jumlah barang dan jasa rutin perkantoran perangkat daerah yang disediakan	154 jenis	1.821.185.641	

	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Dispendukcapil	Jumlah bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai	5 kali	47.261.880	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Dispendukcapil	Jumlah bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai	5 kali	47.261.880	
	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Jumlah sarana dan prasarana kedinasan perangkat daerah yang dikelola	154	688.097.620	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Jumlah sarana dan prasarana kedinasan perangkat daerah yang dikelola	154	688.097.620	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el dan KK)	91%	553.728.000	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el dan KK)	91%	553.728.000	
	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Dispendukcapil	Ketersediaan blangko dan peralatan administrasi kependudukan	53.110 blangko	393.348.000	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Dispendukcapil	Ketersediaan blangko dan peralatan administrasi kependudukan	53.110 blangko	393.348.000	
	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Kota Batu	Jumlah permohonan pelayanan administrasi kependudukan yang diterbitkan dokumennya	31.000 dokumen	79.097.400	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Kota Batu	Jumlah permohonan pelayanan administrasi kependudukan yang diterbitkan dokumennya	31.000 dokumen	79.097.400	
	Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing	Dispendukcapil	Jumlah permohonan pelayanan mutasi WNI dan Orang Asing yang diterbitkan dokumennya	3.000 pemohon	26.400.000	Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing	Dispendukcapil	Jumlah permohonan pelayanan mutasi WNI dan Orang Asing yang diterbitkan dokumennya	3.000 pemohon	26.400.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Luar Wilayah Kota Batu	Jumlah Rakornas/ Bimtek/ koordinasi yang dilakukan	7 kali	54.882.600	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Luar Wilayah Kota Batu	Jumlah Rakornas/ Bimtek/ koordinasi yang dilakukan	7 kali	54.882.600	
	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen akta pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	91%	590.500.864	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen akta pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	91%	590.500.864	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan akta perkawinan, pengesahan anak dan perceraian	91%				Persentase ketepatan waktu pelayanan akta perkawinan, pengesahan anak dan perceraian	91%		

			Keamanan, Ketertiban dan Kemudahan Pelayanan Arsip Pencatatan Sipil	51%				Keamanan, Ketertiban dan Kemudahan Pelayanan Arsip Pencatatan Sipil	51%		
	Penyusunan Pemberkasan Elektronik Pencatatan Sipil	Dispenduk capil	Jumlah arsip akta kelahiran yang telah dialih media	59.000 arsi digital	188.339.664	Penyusunan Pemberkasan Elektronik Pencatatan Sipil	Dispenduk capil	Jumlah arsip akta kelahiran yang telah dialih media	59.000 arsi digital	188.339.664	
	Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Dispenduk capil	Jumlah permohonan layanan akta kelahiran dan kematian yang diterbitkan dokumennya	29.800 akta	388.677.200	Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Dispenduk capil	Jumlah permohonan layanan akta kelahiran dan kematian yang diterbitkan dokumennya	29.800 akta	388.677.200	
	Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan	Kota Batu	Jumlah permohonan layanan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan yang diterbitkan dokumennya	200 pemohon	13.484.000	Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan	Kota Batu	Jumlah permohonan layanan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan yang diterbitkan dokumennya	200 pemohon	13.484.000	
	Program Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Data/Informasi Kependudukan	Kota Batu	Persentase data registrasi kependudukan yang valid	91%	717.033.600	Program Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Data/Informasi Kependudukan	Kota Batu	Persentase data registrasi kependudukan yang valid	91%	717.033.600	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82%				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82%		
	Sinkronisasi, Konsolidasi, Dokumentasi dan pemutakhiran data kependudukan	Dispenduk capil	Jumlah laporan LAMPID dan inovasi pelayanan	13 laporan	300.860.200	Sinkronisasi, Konsolidasi, Dokumentasi dan pemutakhiran data kependudukan	Dispenduk capil	Jumlah laporan LAMPID dan inovasi pelayanan	13 laporan	300.860.200	
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Kota Batu	Buku data penduduk per semester, buku profil, buku data statistik perbulan	15 laporan	183.360.000	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Kota Batu	Buku data penduduk per semester, buku profil, buku data statistik perbulan	15 laporan	183.360.000	
	Survey Kepuasan Masyarakat	Kota Batu	Laporan survey kepuasan masyarakat	3 buku	63.296.400	Survey Kepuasan Masyarakat	Kota Batu	Laporan survey kepuasan masyarakat	3 buku	63.296.400	
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	Kota Batu	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	600 orang	169.517.000	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	Kota Batu	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	600 orang	169.517.000	

**Data Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu**

No	Program/Kegiatan 2018	Indikator	Usulan Program/Kegiatan	Indikator	3 (tiga) Strategi Umum RPJMD Tahun 2018-2022	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Peningkatan dukungan terhadap kinerja administrasi pelayanan perkantoran	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan selama 1 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pegawai yang berkualitas dan profesional; 2. Terasilinasinya sarana dan prasarana untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ; 3. Tercapainya penyelesaian perencanaan dan pelaporan sesuai jadwal yang ditargetkan. 	Mulai tahun perencanaan 2019, program dan kegiatan Sekretariat telah ditentukan oleh Bappeda, yang meliputi 1 program dengan 5 kegiatan. Adanya program dan kegiatan ini menyeragamkan kegiatan rutin seluruh OPD di Pemerintah Kota Batu sekaligus menggantikan program dan kegiatan rutin yang sebelumnya.	
	1. Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola		Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi perkantoran			
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
	3. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat dan staf pengelola administrasi keuangan, Non PNS, THL pelayanan		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang tersedia
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga outsourcing kebersihan/pramubhakti		2. Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan	3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah barang dan jasa rutin perkantoran perangkat daerah yang disediakan		
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan	4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai		
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5. Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kedinasan perangkat daerah yang dikelola		
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perturan perundang-undangan yang disediakan				
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				
10. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah				
11. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				
Pengadaan Pralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara				

	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ketertiban dan kedisiplinan aparatur				
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat atau bimtek sesuai dengan ketentuan				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	Tersedianya dokumen perencanaan Restra OPD				
2.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el dan KK)	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el dan KK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya perekaman KTP-el 100% dari keseluruhan wajan KTP-el; 2. Terwujudnya kesadaran Mayarakat terhadap administrasi kependudukan; 	Adapun perubahan letak kegiatan pada program serta penambahan kegiatan baru dan penghapusan beberapa kegiatan di tahun anggaran 2019 dilakukan

1. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	1. Penerbitan Dokumen Kependudukan	Ketersediaan blangko dan peralatan administrasi kependudukan	3 Tersedianya blangko KTP-el dan Kependudukan sampai 5 tahun kedepan.	dengan pertimbangan: 1. Penyesuaian dengan tugas dan fungsi bidang, sehingga kegiatan diharapkan berorientasi pada keluaran dan program berorientasi pada hasil. 2. Memedomani Renstra 2018-2022 secara penuh setelah sempat melakukan transisi menuju Renstra di tahun 2018.
2. Pelayanan Dokumen Kependudukan	Jumlah pemohon pelayanan administrasi kependudukan yang diterbitkan	2. Pelayanan Dokumen Kependudukan	Jumlah permohonan pelayanan administrasi kependudukan yang diterbitkan		
3. Penerbitan Dokumen Kependudukan	Ketersediaan blangko dan peralatan administrasi kependudukan	3. Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing	Jumlah permohonan pelayanan mutasi WNI dan Orang Asing yang diterbitkan dokumennya		
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan	Jumlah tenaga register administrasi kependudukan	4. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Rakornas/ Bimtek/ koordinasi yang dilakukan		
5. Pendataan Kependudukan di Kota Batu	Pendistribusian data Kependudukan dan Coklit ditingkat RT se Kota Batu				
6. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rapat Koordinasi Nasional / Bimtek / Koordinasi yang dilakukan				
7. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Pengelolaan SIAK				

3.	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	<p>Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen akta pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)</p> <p>Persentase ketepatan waktu pelayanan akta perkawinan, pengesahan anak dan perceraian</p> <p>Keamanan, Ketertiban dan Kemudahan Pelayanan Arsip Pencatatan Sipil</p>	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	<p>Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen akta pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)</p> <p>Persentase ketepatan waktu pelayanan akta perkawinan, pengesahan anak dan perceraian</p> <p>Keamanan, Ketertiban dan Kemudahan Pelayanan Arsip Pencatatan Sipil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pengarsipan dokumen pencatatan sipil secara rapi, teratur dan baik; 2. Terwujudnya kesadaran Masyarakat terhadap administrasi pencatatan sipil terutama akta kelahiran dan kematian; 3. Tersedianya blangko pencatatan sipil sampai 5 tahun kedepan.
	1. Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyimpanan Arsip Pencatatan Sipil	Jumlah rak arsip yang dikelola dan dirawat dengan baik	1. Penyusunan Pemberkasan Elektronik Pencatatan Sipil	Jumlah arsip akta kelahiran yang telah dialih media	
	2. Evaluasi dan Koordinasi Pencatatan Kematian dan Penerapan Buku Induk Kematian	Jumlah penerbitan akta kematian	2. Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Jumlah permohonan layanan akta kelahiran dan kematian yang diterbitkan dokumennya	
	3. Pembuatan Akte Kelahiran Secara Massal	Jumlah penerbitan akta kelahiran	3. Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan	Jumlah permohonan layanan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan yang diterbitkan dokumennya	
	4. Penyusunan Pemberkasan Elektronik Pencatatan Sipil	Jumlah arsip akta pencatatan sipil yang telah dialih media			

4.	Program Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Data/Informasi Kependudukan	Persentase data registrasi kependudukan yang valid	Program Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Data/Informasi Kependudukan	Persentase data registrasi kependudukan yang valid Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya data kependudukan yang valid; 2. Terciptanya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terhadap masyarakat dengan baikserta sesuai SOP; 3. Terwujudnya sarana jaringan yang baik dan menunjang.
	1. Sinkronisasi, Konsolidasi, Dokumentasi dan pemutakhiran data kependudukan	Jumlah laporan kependudukan	1. Sinkronisasi, Konsolidasi, Dokumentasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan	Jumlah laporan LAMPID dan inovasi pelayanan	
	2. Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi	Terpenuhi kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan	2. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Buku data penduduk per semester, buku profil, buku data statistik perbulan	
	3. Pemenuhan Sarana Jaringan, Perangkat Keras, Perangkat Lunak SIAK dan KTP-el	Jumlah sistem inovasi pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi	3. Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	
			4. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	

Batu, 1 Nopember 2018
**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batu**

Drs. MAULIDIONO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600902 197907 1 002

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan). Pada tahun perencanaan 2019, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu baik dari pemangku kepentingan ataupun Musrenbang Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Secara nasional urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil telah mencapai beberapa progres dalam penerapan NIK dan database kependudukan, produk hukum yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2 Perpres sebagai perubahan atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional; serta 8 Permendagri terkait NSPK di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Isu strategis penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional sejalan dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 yakni masih perlu adanya kejelasan dan tindak lanjut dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.

Dalam hal potensi dan peluangnya, data kependudukan yang merupakan himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil digunakan untuk semua keperluan. Sehingga selain telah dilakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data maka upaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan perlu untuk terus ditingkatkan. Kini pelayanan administrasi kependudukan dituntut untuk lebih profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan mengingat semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.

Dari perkembangan kebijakan yang terjadi, maka Administrasi Kependudukan juga dituntut dalam pengelolaan data sekaligus

peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga dengan kata lain pengembangan kebijakan Administrasi Kependudukan kini mengarah pada pemanfaatan data kependudukan selain juga penyelesaian target di bidang Administrasi Kependudukan yang meliputi:

1. Cakupan penerbitan KK,
2. Cakupan penerbitan KTP-el,
3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, dan
4. Cakupan penerbitan Akta Kematian.

Selain itu, sebagai institusi pelayanan publik, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga diukur dari tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota.

Sasaran atas tujuan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Batu yakni:

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sesuai data kependudukan.
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil sesuai data kependudukan
3. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi Kepala Daerah untuk mewujudkan “**Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu yang Mandiri dan Sejahtera.**” pada misi kelima yakni “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional” maka pengutamaan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan pada masyarakat menjadi prioritas dalam tujuan Renja 2019 ini. Sehingga pengukuran dalam capaian kinerja PD menggunakan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Mengacu pada kebijakan nasional dan propinsi dalam hal pemanfaatan dan peningkatan kualitas data kependudukan maka program kegiatan dalam Renja juga sudah semestinya diupayakan mampu memberikan hasil berupa pemanfaatan data dengan kualitas yang baik. Selain itu, dengan mempertimbangkan target Standar Pelayanan Publik (SPM) secara nasional yang masih belum dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu hingga triwulan I tahun 2018, maka program dan kegiatan dalam rangka menuntaskan target tersebut juga menjadi penting untuk direncanakan dalam dokumen Renja 2019 ini.

Secara garis besar, ada 4 program dengan 16 kegiatan pembangunan yang diusulkan Bidang dan Seksi yang menangani dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah diutarakan di atas. Karena sifat pelayanan publik bidang administrasi kependudukan merupakan pelayanan kedalam wilayah maka penyebaran lokasi program dan kegiatan menyebar di tingkat kota, kecamatan, dan desa/kelurahan se-Kota Batu. Fokus kegiatan untuk tahun 2019 yakni pada pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA), dimana tujuan akhirnya yakni mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan di Kota Batu. Secara lebih lengkap, rencana program dan kegiatan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.06.01.01	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan selama 1 tahun	Dispendukcapil	91%	2.904.095.141			92%	2.904.095.141
		Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi perkantoran							
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik							
2.06.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang tersedia	Dispendukcapil	28 dokumen	43.850.000	APBD		28 dokumen	43.850.000
2.06.01.01.02	Penyusunan Sistem Pelaporan	Jumlah laporan	Dispend	113	303.700.000	APBD		113 laporan	303.700.000

	Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	ukcapil	laporan					
2.06.01.01.03	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah barang dan jasa rutin perkantoran perangkat daerah yang disediakan	Dispend ukcapil	154 jenis	1.821.185.641	APBD		154 jenis	1.821.185.641
2.06.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai	Dispend ukcapil	5 kali	47.261.880	APBD		5 kali	47.261.880
2.06.01.01.05	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kedinasan perangkat daerah yang dikelola	Dispend ukcapil	154 kali	688.097.620	APBD		154 kali	688.097.620
2.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el dan KK)	Dispend ukcapil	91%	553.728.000			92%	80.000.000
2.06.01.15.01	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Ketersediaan blangko dan peralatan administrasi kependudukan	Dispend ukcapil	53.110 blangko	393.348.000	DAK		54.172 blangko	-
2.06.01.15.07	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Jumlah permohonan pelayanan administrasi kependudukan yang diterbitkan dokumennya	Kota Batu	31.000 dokumen	79.097.400	DAK		32.464 dokumen	-
2.06.01.15.09	Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing	Jumlah permohonan pelayanan mutasi WNI dan Orang Asing yang diterbitkan dokumennya	Dispend ukcapil	3.000 pemohon	26.400.000	APBD		3600 pemohon	80.000.000
2.06.01.15.13	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan	Jumlah Rakornas/ Bimtek/ koordinasi	Luar Wilayah	7 kali	54.882.600	DAK		9 kali	-

	Administrasi Kependudukan	yang dilakukan	Kota Batu						
2.06.01.16	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen akta pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	Dispendukcapil	91%	590.500.864			92%	435.500.000
		Persentase ketepatan waktu pelayanan akta perkawinan, pengesahan anak dan perceraian		91%				92%	
		Keamanan, Ketertiban dan Kemudahan Pelayanan Arsip Pencatatan Sipil		51%				61%	
2.06.01.16.03	Penyusunan Pemberkasan Elektronik Pencatatan Sipil	Jumlah arsip akta kelahiran yang telah dialih media	Dispendukcapil	59000 arsip digital	188.339.664	APBD		79.000 arsip digital	175.500.000
2.06.01.16.09	Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Jumlah permohonan layanan akta kelahiran dan kematian yang diterbitkan dokumennya	Dispendukcapil	29.800 akta	388.677.200	APBD		44.700 akta	240.000.000
2.06.01.16.11	Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan	Jumlah permohonan layanan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan yang diterbitkan dokumennya	Kota Batu	200 pemohon	13.484.000	APBD		300 pemohon	20.000.000

2.06.01.17	Program Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Data/Informasi Kependudukan	Persentase data registrasi kependudukan yang valid	Dispendukcapil	91%	717.033.600			92%	340.000.000
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		82%				83%	
2.06.01.17.03	Sinkronisasi, Konsolidasi, Dokumentasi dan pemutakhiran data kependudukan	Jumlah laporan LAMPID dan inovasi pelayanan	Kota Batu	13 laporan	300.860.200	APBD		12 laporan	265.000.000
2.06.01.17.07	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Buku data penduduk per semester, buku profil, buku data statistik perbulan	Kota Batu	15 laporan	183.360.000	DAK		15 laporan	-
2.06.01.17.11	Survey Kepuasan Masyarakat	Buku IKM	Kota Batu	3 buku	63.296.400	APBD		4 buku	75.000.000
2.06.01.17.13	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	Kota Batu	600 orang	169.517.000	DAK		600 orang	-

Batu, 1 Nopember 2018

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batu**

Drs. MAULIDIONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600902 197907 1 002

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pejabat pelaksana teknis mempedomani capaian target kinerja pada rencana kerja ini dengan memperhatikan kerangka acuan kerja yang telah dibuat sebelumnya.

Rencana kerja ini mencakup indikator dan capaian kinerja yang akan dicapai secara berkala oleh pejabat pelaksananya. Dengan mempedomani rencana kinerja ini diharapkan akan memudahkan dalam penyusunan pelaporan realisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Penyesuaian kondisi yang ada di lapangan tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakannya perubahan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis yang meliputi indikator dan target capaian kinerja dengan disertai kajian yang tertuang dalam kerangka acuan kerja perubahan program dan kegiatan.